
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2018 (12)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang pembentukan dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini memuat ketentuan mengenai keanggotaan, kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD. Selain itu, juga diatur mengenai waktu dan tata cara musyawarah BPD yang harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa di Kabupaten Gresik.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku